



Peran Disiplin Mata Kuliah Ilmu Filsafat dalam Strategi Pendidikan untuk Mahasiswa Bidang Ilmu Administrasi Publik

Hendri Suwarsono

Public Administration, Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis: hendrisuwarsono@ugj.aci.id

Abstract. *This study aims to identify the optimal model in the integration of philosophical disciplines in the structure of the educational program of "Public Administration" students, as well as explore the features of the management of educational strategies suitable for the training of civil servants. The main focus of this research is: 1) academic management strategies to overcome curriculum overlap due to the dominance of philosophical disciplines in public administration study programs; 2) adaptation of educational programs for public administration students to be in line with the needs of the world of work, both at national and international levels; 3) characteristics of internationalization of public administration education programs, especially in the context of academic mobility and adaptation of the Indonesian public administration system to global standards. This research uses the cultural-historical analysis approach, comparative method, structural-functional method, and expert evaluation to explore and analyze problems and develop solutions. The research findings show that the dominance of traditional philosophy courses in the curriculum is often ineffective in shaping the competencies needed in the world of work. The research identified three main challenges: saturation of the curriculum with theoretical courses, lack of connection between the curriculum and the practical needs of the working world, and low use of English in teaching key courses. To address these issues, this research proposes restructuring the curriculum through the integration of three disciplinary groups: applied logic, cultural studies, and applied political science. In addition, the implementation of a contextualized bilingual learning model is also considered as a solution to improve the relevance of the curriculum. The uniqueness of this article lies in its approach that combines philosophical studies with managerial strategies in curriculum design, complemented by empirical experiences from international and cross-institutional cooperation. This article offers a reinterpretation of the utilization of philosophy as a tool for the development of professional competence in public administration education, not just as an abstract worldview. This article provides a practical contribution for study program managers and higher education curriculum designers in formulating strategies that are more adaptive to global needs. The recommendations provided, such as the contextual use of English and the restructuring of skills-based courses, can be a reference in improving the competitiveness of graduates and strengthening academic collaboration across countries.*

Keywords: *Discipline of Philosophy; Public Administration Education Curriculum; Student Education Strategy.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model optimal dalam integrasi disiplin ilmu filsafat dalam struktur program pendidikan mahasiswa "Administrasi Publik", serta menggali fitur pengelolaan strategi pendidikan yang sesuai untuk pelatihan pegawai negeri. Fokus utama penelitian ini adalah: 1) strategi pengelolaan akademik untuk mengatasi tumpang tindih kurikulum akibat dominasi disiplin filosofis dalam program studi administrasi publik; 2) adaptasi program pendidikan untuk mahasiswa administrasi publik agar sejalan dengan kebutuhan dunia kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional; 3) karakteristik internasionalisasi program pendidikan administrasi publik, terutama dalam konteks mobilitas akademik dan adaptasi sistem administrasi publik Indonesia dengan standar global. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis budaya-sejarah, metode komparatif, metode struktural-fungsional, dan evaluasi ahli untuk menggali dan menganalisis permasalahan serta mengembangkan solusi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dominasi mata kuliah filsafat tradisional dalam kurikulum sering kali tidak efektif dalam membentuk kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Penelitian ini mengidentifikasi tiga tantangan utama, yaitu: kejenuhan kurikulum dengan mata kuliah teoretis, kurangnya keterkaitan antara kurikulum dan kebutuhan praktis dunia kerja, serta rendahnya penggunaan bahasa Inggris dalam pengajaran mata kuliah kunci. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini mengusulkan restrukturisasi kurikulum melalui integrasi tiga kelompok ilmu: logika-aplikatif, studi budaya, dan ilmu politik terapan. Selain itu, penerapan model pembelajaran bilingual yang kontekstual juga dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan relevansi kurikulum. Keunikan artikel ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan kajian filosofis dengan strategi manajerial dalam desain kurikulum, dilengkapi dengan pengalaman empiris dari kerja sama internasional dan lintas lembaga. Artikel ini menawarkan reinterpretasi pemanfaatan filsafat sebagai alat untuk pengembangan kompetensi profesional dalam pendidikan administrasi publik, bukan hanya sebagai pandangan dunia yang abstrak. Artikel ini memberikan kontribusi praktis bagi pengelola program studi dan perancang kurikulum pendidikan tinggi dalam merumuskan

strategi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan global. Rekomendasi yang diberikan, seperti penggunaan bahasa Inggris secara kontekstual dan restrukturisasi mata kuliah berbasis keterampilan, dapat menjadi acuan dalam meningkatkan daya saing lulusan dan memperkuat kolaborasi akademik lintas negara.

Kata Kunci: Disiplin Ilmu Filsafat; Kurikulum Pendidikan Administrasi Publik; Strategi Pendidikan Mahasiswa.

1. LATAR BELAKANG

Artikel ini mengkaji peran strategis disiplin mata kuliah ilmu filsafat dalam pengembangan kurikulum pendidikan bagi mahasiswa Program Studi Administrasi Publik di Universitas Swadaya Gunung Jati, mencakup jenjang sarjana dan magister. Penulis mendasarkan analisis pada pengalaman empiris dalam merancang, mengelola, dan melaksanakan strategi pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan akademik dan profesional. Fokus utama ditujukan pada identifikasi tantangan pengelolaan yang muncul dalam pengintegrasian mata kuliah filsafat sebagai bagian dari pembentukan kompetensi umum mahasiswa di bidang ilmu administrasi publik. Berdasarkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan nasional dan internasional, serta referensi dari literatur ilmiah global, penulis menawarkan pendekatan solutif terhadap problematika tersebut demi penguatan kualitas pendidikan administrasi publik yang adaptif terhadap dinamika global serta pengembangan bagi mata kuliah filsafat ilmu dikalangan mahasiswa administrasi publik.

Saat menganalisis elemen fungsi disiplin ilmu filosofis dalam strategi pendidikan dan program pendidikan secara umum, serta dalam administrasi publik, penulis menggunakan studi penelitian oleh Rudenko et al. (2019), Bazaluk (2018), Svyrydenko (2016), Ongaro (2019), Hryvnaк and Palahniuk (2024) dan lain-lain. Karya penelitian para penulis ini adalah yang paling modern dan berwibawa di bidang ini.

Studi para penulis ini didasarkan pada pengalaman praktis, yang mencakup penciptaan pusat pendidikan di Universitas Swadaya Gunung Jati; organisasi ilmiah yang berwibawa; publikasi jurnal ilmiah internasional terkemuka; partisipasi dalam hibah internasional Eropa dan proyek antar negara bagian lainnya.

Disiplin ilmu filsafat memainkan peranan penting dalam membentuk kompetensi umum dalam sistem pendidikan tinggi, khususnya dalam program studi Administrasi Publik. Peran sentral filsafat dan disiplin ilmu filosofis dalam menciptakan landasan budaya dan intelektual bagi mahasiswa sudah dianggap sebagai bagian esensial yang tidak memerlukan pembuktian ulang. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan di Universitas Nasional Taras Shevchenko Kyiv, telah menyoroṭi tantangan dan strategi

dalam mengelola program pendidikan berbasis filsafat untuk pelatihan pegawai negeri (Rudenku et al., 2019). Di sisi lain, pendekatan yang dominan di lingkungan pendidikan tinggi Indonesia menunjukkan bahwa penempatan filsafat sebagai elemen utama dalam kurikulum masih menghadapi berbagai tantangan manajerial, terutama dalam konteks integrasi dengan kebutuhan praktis dan kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja nasional maupun internasional (Kusumastuti et al., 2024).

Beberapa peneliti seperti Sodomora (2018) dan Yosypenko (2018) telah menunjukkan adanya persoalan metodologis dalam praktik pendidikan filsafat pasca-totalitarian, yang ditandai dengan munculnya sikap sinisme dan nihilisme. Kondisi ini turut berdampak pada menurunnya mutu dan daya saing program pendidikan, termasuk dalam bidang administrasi publik.

Mengacu pada kerangka pemikiran Bazaluk (2018) terdapat dua paradigma utama dalam memahami filsafat di pendidikan tinggi: pendekatan "garis Plato" yang menekankan pengembangan pandangan dunia dan pembentukan karakter, serta pendekatan "garis Isocrates" yang memandang filsafat sebagai alat pedagogis untuk membentuk keahlian praktis. Dalam konteks pendidikan administrasi publik, dominasi pendekatan filsafat sebagai pandangan dunia dinilai kurang relevan terhadap kebutuhan kompetensi teknis dan manajerial yang dibutuhkan lulusan.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi pendidikan yang mempertimbangkan tiga persoalan utama dalam pengelolaan program studi administrasi publik: (1) kejenuhan program pendidikan oleh mata kuliah teoritis-filosofis yang belum sepenuhnya membentuk kompetensi umum; (2) kebutuhan adaptasi program pendidikan dengan kebutuhan riil pemberi kerja tanpa mengorbankan keunggulan akademik; dan (3) keterbatasan penggunaan bahasa Inggris dalam penyampaian mata kuliah inti yang berorientasi pada kompetensi global.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis budaya-sejarah untuk memahami dinamika perkembangan dan transformasi kurikulum pendidikan administrasi publik, dengan fokus pada dominasi disiplin filsafat dalam struktur program studi tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali konteks historis dan budaya yang memengaruhi pembentukan kurikulum, serta untuk mengidentifikasi pengaruh nilai-nilai filosofis terhadap proses pengajaran yang ada. Melalui analisis ini, penelitian berusaha mengungkap faktor-faktor historis yang membentuk desain kurikulum administrasi publik

dan tantangan yang muncul dalam penyesuaian kurikulum tersebut dengan kebutuhan dunia kerja.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode komparatif untuk membandingkan program pendidikan administrasi publik di berbagai institusi pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi keberhasilan berbagai model kurikulum yang diterapkan di berbagai negara dan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks pendidikan Indonesia. Melalui metode ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan yang ada dalam kurikulum pendidikan administrasi publik serta memberikan rekomendasi terkait pengembangan kurikulum yang lebih responsif terhadap perkembangan global.

Untuk mendalami struktur dan fungsi kurikulum dalam membentuk kompetensi mahasiswa, penelitian ini juga mengaplikasikan metode struktural-fungsional. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara berbagai komponen dalam kurikulum, seperti mata kuliah filsafat dan keterampilan praktis, serta bagaimana interaksi antar komponen tersebut mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Selain itu, evaluasi ahli dilakukan untuk memperoleh pandangan dari pakar di bidang pendidikan dan administrasi publik, guna memastikan bahwa model kurikulum yang diusulkan memiliki relevansi dan efektivitas yang tinggi dalam menjawab tuntutan dunia kerja yang terus berkembang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Solusi manajerial terhadap ketiga isu tersebut sangat krusial untuk membangun strategi pendidikan yang lebih efektif dan relevan dalam pelatihan mahasiswa administrasi publik di era global.

1. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan kurikulum program studi Administrasi Publik adalah kejenuhan materi ajar yang terlalu didominasi oleh disiplin ilmu sejarah dan filsafat teoretis.

Pengisian kurikulum dengan mata kuliah seperti "Sejarah Filsafat Kuno", "Filsafat Abad Pertengahan dan Renaisans", "Epistemologi", "Metafisika", "Etika", "Filsafat Politik", dan sejenisnya, dimaksudkan untuk membentuk kompetensi umum seperti pola pikir ilmiah, kesadaran etis, dan kemampuan reflektif. Namun dalam implementasinya, pendekatan ini sering kali tidak efektif

untuk mahasiswa non-filsafat, khususnya di bidang administrasi publik, karena sifat mata kuliahnya yang terlalu abstrak dan konseptual.

Pengalaman menunjukkan bahwa pemahaman terhadap filsafat dalam konteks pendidikan administrasi publik cenderung masih mengedepankan model "garis Plato", yakni menekankan filsafat sebagai sistem pandangan dunia. Hal ini berpotensi menciptakan kebingungan dan resistensi dari mahasiswa terhadap proses pembelajaran, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya efektivitas dalam pencapaian kompetensi umum.

Masalah ini tidak lepas dari pengaruh historis dalam pengembangan pendidikan tinggi, seperti warisan model Belanda atau Amerika yang membakukan struktur pelatihan filsafat pada tahap awal pendidikan tinggi, termasuk bagi calon pejabat publik (Rachmad et al., 2022). Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan manajerial baru dalam restrukturisasi kurikulum.

Solusi yang dapat ditawarkan adalah mengganti dominasi mata kuliah filsafat tradisional dengan tiga kelompok disiplin yang lebih aplikatif namun tetap berakar pada pemikiran filosofis:

- a) Siklus logika-aplikatif, yang menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, analisis argumentasi, retorika, dan komunikasi persuasif dalam konteks manajerial;
- b) **Siklus kajian budaya**, yang mengkaji dinamika budaya sebagai bagian dari praktik manajemen dan komunikasi publik;
- c) Siklus ilmu politik terapan, yang merefleksikan dimensi politis dan kebijakan dalam tata kelola publik.

Pendekatan ini merepresentasikan filsafat bukan sebagai sistem ideologis yang abstrak, melainkan sebagai seperangkat alat konseptual dan praktis yang mendukung terbentuknya kompetensi profesional (Antera, 2021). Dengan demikian, kompetensi umum tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi dapat dirumuskan secara praktis dan terukur dalam proses pelatihan pada mahasiswa sebagai calon aparatur negara dan manajer publik. Implementasi model ini dalam praktik pendidikan telah menunjukkan hasil yang positif, termasuk meningkatnya pemahaman dan keterlibatan mahasiswa terhadap materi pembelajaran.

2. Kesesuaian antara program pendidikan administrasi publik dengan kebutuhan pasar kerja nasional maupun internasional menjadi tantangan penting yang

perlu segera diatasi, terutama tanpa mengorbankan keunggulan pendidikan berbasis universitas klasik.

Permasalahan utama terletak pada ketidakseimbangan antara kompetensi khusus yang telah sesuai dengan ekspektasi pemberi kerja, dan kompetensi umum yang belum terbentuk secara optimal dalam lingkungan akademik. Berdasarkan temuan Nelipa and Batrymenko (2018), banyak pemberi kerja menilai bahwa pembentukan kompetensi umum seperti kemampuan berpikir kritis, komunikasi lintas budaya, dan integritas profesional lebih banyak dikembangkan di dunia kerja dibandingkan di perguruan tinggi.

Dalam konteks kerja sama antara universitas dan dunia industri, hal ini menimbulkan risiko berkurangnya nilai pendidikan klasik, terutama ketika pemberi kerja meragukan kontribusi mata kuliah filsafat dalam membentuk kompetensi umum yang relevan secara praktis. Situasi ini semakin kompleks dalam kerja sama internasional, di mana penyusunan program pendidikan bersama dan mobilitas akademik menuntut keselarasan standar kompetensi lintas negara.

Pendekatan strategis yang dapat diterapkan untuk menjawab tantangan ini adalah menyelaraskan rumusan kompetensi lulusan, baik kompetensi khusus maupun umum, yaitu dengan masukan dari pemberi kerja dan mitra akademik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Studi kasus kerja sama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati di Cirebon dengan mitra pemerintah daerah, swasta hingga perguruan tinggi dalam dan luar negeri menunjukkan model yang berhasil dalam menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan global, melalui pendirian pusat pendidikan bersama pada tahun 2023:

Melalui kegiatan pusat tersebut, tercapai berbagai capaian penting, antara lain:

- a) Harmonisasi kebijakan pengelolaan pendidikan tinggi dan penelitian di wilayah Cirebon dan Jawa Barat,
- b) Penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan riil dunia kerja,
- c) Penguatan kompetensi bahasa dan komunikasi dalam konteks spesialisasi ilmu sosial dan humaniora,
- d) Pelibatan lembaga non-pemerintah dalam proyek ilmiah dan pendidikan kolaboratif.

Kerja sama lintas institusi ini memberikan ruang untuk mengevaluasi dan merevisi kurikulum agar lebih adaptif terhadap tuntutan global tanpa kehilangan esensi dari pendekatan pendidikan universitas klasik (Ahmad et al., 2023). Pengalaman ini juga menunjukkan perlunya membangun kesepahaman yang lebih dalam tentang konsep kompetensi umum dalam pendidikan tinggi, sebagaimana perbedaan yang pernah tercatat antara pendekatan integrasi sistem pendidikan tinggi di Ukraina dan di Polandia (Czyż, 2018). Jika di Ukraina integrasi masih bersifat formal, maka universitas-universitas di Polandia justru menerapkannya sebagai transformasi substantif yang bertumpu pada pembentukan kompetensi umum untuk mendukung komunikasi lintas budaya dan mobilitas global (Aita & Irina, 2019).

Dengan demikian, kolaborasi semacam ini menunjukkan bahwa pembentukan kompetensi umum, termasuk yang berakar pada filsafat praktis, dapat dan perlu dikembangkan dalam pendidikan administrasi publik, tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai elemen strategis dalam mendukung kesiapan lulusan menghadapi tantangan global secara profesional dan etis (Pratama & Dewi, 2023).

3. Kemampuan penggunaan bahasa Inggris yang terbatas dalam pengajaran mata kuliah logis, politik, dan budaya menjadi tantangan tersendiri dalam pembentukan kompetensi umum mahasiswa administrasi publik.

Dalam praktik pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di wilayah Cirebon dan Jawa Barat, penguasaan bahasa Inggris pada umumnya dikembangkan melalui mata kuliah Bahasa Inggris Umum yang diselenggarakan oleh pusat bahasa universitas, serta pelatihan bahasa khusus di bidang keahlian tertentu. Meskipun pendekatan ini secara struktural tampak memadai, dalam realitasnya masih terjadi kesenjangan yang cukup signifikan antara penguasaan bahasa Inggris secara umum dan penerapannya dalam konteks akademik dan profesional administrasi publik.

Kesenjangan ini tercermin dalam ketidaksesuaian antara konten Bahasa Inggris Umum yang bersifat generik dengan terminologi dan pendekatan yang digunakan dalam mata kuliah khusus administrasi publik yang juga diajarkan dalam bahasa Inggris. Akibatnya, mahasiswa mengalami hambatan dalam mengintegrasikan kemampuan linguistik dengan pemahaman substansial terhadap materi yang bersifat multidisipliner, terutama dalam mata

kuliah yang bertujuan membentuk kompetensi umum seperti logika, filsafat politik, dan studi budaya.

Mengatasi hal ini, diperlukan strategi pembelajaran bahasa Inggris yang kontekstual, yaitu melalui integrasi pengajaran bahasa ke dalam mata kuliah substansial yang mendukung pembentukan kompetensi umum. Praktik ini mulai diterapkan secara terbatas di beberapa perguruan tinggi di Jawa Barat, di mana mata kuliah logika, kulturologi, dan ilmu politik diajarkan dalam bahasa Inggris. Model ini terbukti lebih efektif karena memperkuat konektivitas antara lingkungan belajar filologis dan lingkungan profesional, sehingga mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dalam menggunakan bahasa Inggris dalam konteks keilmuan dan komunikasi administrasi publik.

Meskipun penerapannya masih terbatas, pendekatan integratif ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesinambungan penggunaan bahasa Inggris dalam seluruh kurikulum pendidikan administrasi publik (Rosenbloom et al., 2022). Hal ini sekaligus memperkuat kesiapan lulusan dalam menghadapi tantangan global yang menuntut penguasaan bahasa internasional sebagai alat berpikir kritis, komunikasi antarbudaya, dan penyusunan kebijakan publik dalam ruang lingkup transnasional.

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa disiplin ilmu filosofis memiliki peran strategis dalam merancang pendidikan modern bagi mahasiswa program studi Administrasi Publik. Peran ini terutama berkaitan dengan kontribusinya dalam membentuk kompetensi umum, seperti kemampuan berpikir kritis, pemahaman etika profesi, dan kesadaran budaya. Namun demikian, pendekatan konvensional yang mengandalkan dominasi disiplin filsafat historis dan teoretis dalam kurikulum perlu ditinjau ulang. Pendekatan tersebut kurang relevan terhadap kebutuhan aktual dunia kerja dan sering kali gagal dalam menjembatani mahasiswa dengan tuntutan kompetensi abad ke-21:

Penelitian ini mengidentifikasi tiga permasalahan utama dalam struktur kurikulum pendidikan administrasi publik di Indonesia, khususnya di wilayah Cirebon dan Jawa Barat, yakni: (1) kejenuhan kurikulum dengan mata kuliah filsafat historis yang kurang efektif dalam pembentukan kompetensi

umum; (2) belum optimalnya penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan pemberi kerja nasional dan internasional, yang mengancam hilangnya ciri khas pendidikan universitas klasik; dan (3) rendahnya pemanfaatan bahasa Inggris dalam pengajaran mata kuliah logis, politis, dan budaya, yang justru penting bagi pembentukan kompetensi lintas budaya dan global.

Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan pergeseran strategi pendidikan menuju integrasi disiplin filsafat yang lebih aplikatif dan kontekstual, seperti logika terapan, studi budaya, dan ilmu politik praktis. Integrasi ini perlu didukung dengan pendekatan pengajaran bilingual atau berbasis bahasa Inggris yang terstruktur, untuk mengembangkan kompetensi linguistik dan profesional mahasiswa secara simultan. Model pendidikan semacam ini diyakini mampu meningkatkan kualitas lulusan di bidang administrasi publik, serta memperkuat daya saing pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di kawasan Cirebon dan Jawa Barat, dalam menghadapi dinamika globalisasi dan tantangan tata kelola publik masa depan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin mata kuliah ilmu filsafat memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan dasar pemikiran kritis dan etika dalam pendidikan administrasi publik. Namun, dominasi mata kuliah filsafat tradisional dalam kurikulum program studi administrasi publik sering kali tidak efektif dalam menjawab kebutuhan praktis dunia kerja. Keberadaan mata kuliah filsafat seharusnya tidak hanya dilihat sebagai upaya memperkenalkan mahasiswa pada pandangan dunia yang abstrak, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan kompetensi profesional yang relevan dan aplikatif. Oleh karena itu, restrukturisasi kurikulum dengan mengintegrasikan mata kuliah filsafat secara lebih kontekstual dan aplikatif sangat diperlukan, guna menciptakan keseimbangan antara teori dan praktik. Temuan penelitian ini juga mengindikasikan bahwa kurikulum administrasi publik harus lebih adaptif terhadap dinamika global dan kebutuhan industri. Internasionalisasi program pendidikan, termasuk penguatan penggunaan bahasa Inggris dan pengembangan kompetensi lintas budaya, menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing lulusan. Pembaharuan kurikulum yang mengintegrasikan logika-aplikatif, studi budaya, serta ilmu politik terapan, diharapkan dapat menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki landasan filsafat yang kuat, tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya peran filsafat dalam pendidikan administrasi publik, dengan catatan bahwa filsafat harus disesuaikan dengan konteks kekinian dan kebutuhan pasar global. Penataan kembali struktur kurikulum yang mengedepankan kompetensi praktis dan pembelajaran bilingual yang relevan akan memperkuat kualitas pendidikan dan daya saing lulusan, serta memperkuat kolaborasi internasional dalam pendidikan administrasi publik.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, D., McFarlane, R. A., Smith, J., Saxena, D., Somerset, S., & Mavalankar, D. (2023). Evaluation of a virtual, simulated international public health peer-to-peer exchange learning experience. *Frontiers in Public Health*, 11, Article 1144716. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1144716>
- Aita, S., & Irina, M. (2019). Digital re-evolution: Learning to be human at contemporary society. *Philosophy and Cosmology*, 22, 129–136.
- Antera, S. (2021). Professional competence of vocational teachers: A conceptual review. *Vocations and Learning*, 14(3), 459–479. <https://doi.org/10.1007/s12186-021-09266-5>
- Bazaluk, O. (2018). The feature transformations of the basic meanings of Greek paideia in the educational theories in the Middle Ages. *Schole: Ancient Philosophy and the Classical Tradition*, 12(1), 243–258.
- Czyż, A. (2018). An analysis of Polish teachers' attitudes towards inclusive education. *Future Human Image*, 10, 4–19.
- Hryvna, B., & Palahniuk, M. (2024). On the issue of improving the efficiency of public administration in the sphere of higher education: Philosophical and worldview aspect. *Coordinates of Public Administration*, 2, 179–195.
- Kusumastuti, N. A., Nugroho, A. B., Fauziati, E., Haryanto, S., & Supriyoko, A. (2024). Perspektif filsafat progresivisme pada pembelajaran informatika. *PROFICIO*, 5(1), 722–730.
- Nelipa, D., & Batrymenko, O. (2018). Strategy, management model and educational scientific civil servants training program in postgraduate studies of the university. *Scientific Bulletin of National Mining University*, 2, 178–183.
- Ongaro, E. (2019). The teaching of philosophy in public administration programmes. *Teaching Public Administration*, 37(2), 135–146. <https://doi.org/10.1177/0144739418805093>
- Pratama, Y. A., & Dewi, L. (2023). Pengembangan kokurikuler: Menumbuhkan potensi, meraih merdeka belajar. Indonesia Emas Group.
- Rachmad, F., Mansur, A., & Bakar, A. (2022). Proses inovasi kurikulum dan pembelajaran. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 1(2), 516–522.

- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2022). *Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector* (8th ed.). Routledge.
- Rudenko, S., Bazaluk, O., Tsvykh, V., & Kalmuk, I. (2019). The role of philosophical disciplines in educational strategies for specialist training in the field of public administration. *Scientific Bulletin of National Mining University*, 3, 155–161.
- Sodomora, P. (2018). Ukrainian philosophical thought at the brink between East and West. *Ukrainian Policymaker*, 3(3), 65–71.
- Svyrydenko, D. (2016). Mobility turn in contemporary society as an educational challenge. *Future Human Image*, 6, 94–100.
- Yosypenko, S. (2018). Philosophy and post-totalitarian practices. *Future Human Image*, 9, 134–144.